



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 859/IV/2015

IV/APRIL 2015



DPR Harapkan Kapolri Mampu Tingkatkan Citra dan Wibawa



DPR Harapkan Kapolri Mampu Tingkatkan Citra dan Wibawa



Rapat Paripurna DPR RI menyetujui dan mengesahkan pencalonan Kapolri Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru

Rapat Paripurna DPR akhirnya secara aklamasi menyetujui dan mengesahkan pencalonan Kapolri Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol. Drs. Sutarmanto. Persetujuan dicapai dalam Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Ketua Setya Novanto, Wakil Ketua Ketua Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto, Kamis (16/04).

Pengesahan Calon Kapolri ini termasuk mulus dan cepat, sebab pada Kamis pagi digelar uji kepatutan dan keyakakan, sore hanya langsung Rapat paripurna. Bahkan pada hari Jumat (17/4) pagi, Kapolri baru tersebut dilantik Presiden Joko Widodo di Istana

Negara.

Dalam laporannya, Komisi III DPR menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas dan kompetensi Calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak untuk menjadi Kapolri. “Atas dasar itu Komisi III DPR menyetujui untuk mengangkat Calon Kapolri, dengan harapan Kapolri terpilih sungguh-sungguh dapat dan mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri,” harap Ketua Komisi III DPR Azis Samsudin.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna Komjen Polisi Badrodin Haiti telah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan dan hasilnya telah disetujui secara aklamasi oleh Komisi III DPR. “

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno tersebut, Komisi III DPR melalui pandangan Fraksi-Fraksi menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan meminta Presiden membatalkan Pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri, “tegas Azis.

Sehari sebelumnya Rabu (15/4), Komisi III DPR juga melakukan kunjungan ke kediaman Calon Kapolri. Komisi III mengunjungi kediaman Calon Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti, di Jalan Kahfi II No.34 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Komisi III menaruh simpati kepada

keluarga besar Badrodin Haiti. “Banyak hal yang menarik dalam kehidupan pribadi Badrodin Haiti,” ungkap III Aziz Syamsudin dengan ucapan “Selamat kepada institusi Polri, semoga pelantikan saudara Badrodin Haiti dapat segera dilakukan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan keamanan bagi

masyarakat Indonesia”.

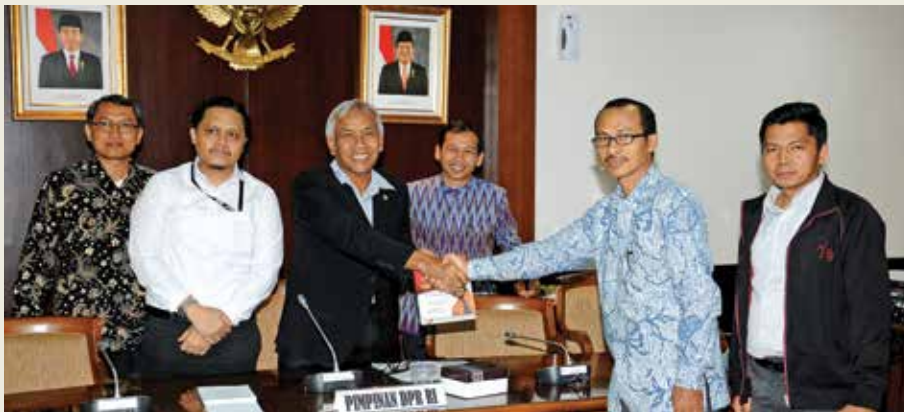
Menjelaskan jalannya uji kelayakan, Aziz mengatakan, dalam rapat tersebut, sempat terjadi perdebatan apakah perlu menyurati Presiden untuk mencabut Surat Presiden perihal pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri yang sudah disetujui di

Paripurna DPR.

“Akhirnya seluruh anggota Komisi III DPR menyetujui agar Pimpinan DPR menyurati Presiden untuk mencabut Surat Presiden perihal Pecalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri,” ia menambahkan. (spy, as,mp)

Foto: iwan armanias/parle/iw

Pendidikan di Indonesia Tak Kalah dari Negara Lain



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima Tim Pusat Studi SDM Universitas Negeri Jakarta dan CEDes

Pendidikan Indonesia tidak kalah dibanding Negara lain. Jika pun banyak lulusan luar negeri yang lebih mudah mendapat pekerjaan di Indonesia, hal itu lebih pada keberpihakan CEO dari perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto saat menerima Tim Pusat Studi SDM Universitas Negeri Jakarta dan CEDes di ruang rapat pimpinan, Rabu (15/4).

“Kita memang sudah harus siap memasuki Masyarakat Ekonomi

Asean di Tahun 2015 ini. Salah satunya adalah dengan peningkatan SDM (sumber daya manusia), sehingga kita tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Meski demikian saya tidak setuju jika dikatakan bahwa dunia pendidikan kita kalah dibanding negara lain. Karena saya sudah membandingkannya dengan berbagai negara lainnya. Dan jika pun banyak lulusan luar negeri yang lebih mudah mendapat pekerjaan di Indonesia, itu lebih karena keberpihakan CEO atau pihak HRD perusahaan yang bersang-

kutan, bukan kepada intelektualitas atau kemampuan lulusan dalam negeri yang lebih rendah dibanding lulusan luar negeri,” jelas Agus.

Pada kesempatan itu Agus juga ikut menyoroti sumbangsih pemikiran yang dipaparkan Tim UNJ dan CEDes dengan judul *Roadmap Masa depan Indonesia; Strategi Pembangunan SDM 2045*. Menurut Agus, sebuah *roadmap* dan strategi pembangunan harus disinkronisasi dengan RPJMN (Rencana pembangunan jangka menengah nasional), dan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), yang sebelumnya sempat bernama *Bangka-jang (Pembangunan Jangka Panjang)* dan *Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)*.

“Tidak bisa sebuah strategi pembangunan langsung ditujukan pada jangka panjang hingga 2045, karena di masa itu tentu sudah mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan, dimana masing-masing pemerintahan memiliki visi dan program yang berbeda-beda. Dengan demikian akan lebih baik jika sebuah gagasan yang baik ini tentang *Roadmap Masa depan Indonesia* beserta strategi pembangunan SDM itu harus disinkronisasi dengan program-program jangka pendek, menengah dan panjang,” tegasnya. (Ayu/

foto:iwan armanias/parle/iw.



Ketua DPR RI Setya Novanto

DPR Minta Pemerintah Evaluasi WNI Yang Akan Dihukum Mati

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kerja Indonesia (TKI) Siti Zaenab asal Bangkalan Madura di Arab Saudi, setelah dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB waktu setem-

pat tanpa sepengetahuan Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) atau Pemerintah Indonesia.

“DPR RI mengharapkan, pemerintah dengan kejadian ini harus segera me-

ngevaluasi kembali kepada seluruh masalah di negara-negara sahabat yang ada Warga Negara Indonesia (WNI) akan di hukum mati, agar kejadian ini tidak terulang kembali,” ungkap Ketua DPR Setya Novanto kepada wartawan setelah membuka Workshop Baleg DPR di Gedung Pustakaloka DPR RI, Rabu (15/04).

Setya Novanto mengatakan bahwa Pemerintah harus proaktif memverifi-

kasi, mengevaluasi WNI yang terjerat kasus hukum agar tak ada lagi hal-hal semacam ini (eksekusi mati). Pemerintah harus bisa mengajukan permohonan pengampunan kepada negara yang bersangkutan, memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada mereka yang berurusan dengan hukum di negara lain.

Ia juga mengharapkan pemerintah harus mampu melakukan negosiasi ke-

pada negara sahabat jika ada TKI yang bermasalah dengan hukum. Sehingga eksekusi mati terhadap WNI bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan & kasus yang menimpa Zaenab tidak terulang kembali.

“Dalam kesempatan ini saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhumah Siti Zaenab,” tutup Novanto. (skr) foto: naefurodji/parle/hr

Banpol PP Tuntut Jadi PNS



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima sejumlah Perwakilan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon menerima sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Nusantara. Personil Banpol PP ini datang untuk meminta kejelasan mengenai statusnya yang masih non Pegawai Negeri Sipil. Padahal menurut peraturan perundangan, seharusnya Banpol PP ini adalah PNS, sehingga statusnya menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.

Ditemui usai pertemuan di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Selasa (14/04/15), Fadli menjanjikan untuk segera menindaklanjuti tuntutan para Banpol PP non-PNS ini. Ia menyatakan akan menyampaikan permasalahan ini kepada Komisi II DPR.

“Saya sudah mendapatkan informasi bahwa status Satpol PP ini ada yang PNS dan non PNS. Mereka menyampaikan agar status mereka diperjelas,

sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Seharusnya mereka statusnya adalah PNS. Karena statusnya non PNS, sehingga penghasilan pun di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Ini akan kami tindaklanjuti kepada Komisi II, untuk mengundang instansi yang berkait,” jelas Fadli.

Politisi F-Gerindra ini sedikit kaget mengenai penghasilan personil Banpol PP non PNS ini yang kebanyakan masih di bawah UMP. Belum lagi, Banpol PP ini tidak diberikan tunjangan kesehatan maupun tunjangan pensiun. Padahal, secara tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) setara dengan Satpol PP PNS.

“Penghasilan mereka masih di bawah UMP, dan sedikit berbeda dengan Satpol PP yang statusnya PNS, walaupun secara tupoksi sama. Mereka juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan, tidak ada tunjangan pen-

siun. Dan jika ada resiko kerja mereka tidak mendapatkan pembelaan yang berarti,” imbuh Fadli.

Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini mengingatkan, bahwa Satpol PP maupun Banpol PP memiliki tugas dan fungsi yang cukup penting, terutama dalam pengamanan. Sehingga, Pemerintah harus melihat kebutuhan personil, dengan kemampuan untuk membiayai gajinya.

“Kita harus menghargai, jangan ada personil Banpol PP yang dibedakan, karena status, padahal secara tupoksi sama,” tukas Fadli.

Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Riswan menjelaskan, pihaknya menuntut untuk diberi kejelasan statusnya. Mengingat, menurut regulasi dan aturan Perundang-Undangan, yaitu UU No 23 Tahun 2014 pasal 256 Ayat 1, disebutkan bahwa status dan kedudukan Satpol PP adalah PNS. Kemudian diperkuat oleh PP No 6 tahun 2010 tentang Satpol PP dan Peraturan Menteri PAN dan RB No 4, tentang jabatan fungsional Satpol PP harus berstatus sebagai PNS.

“Namun pada kenyataannya, kami masih berstatus Banpol PP, atau Satpol PP Non PNS. Pemerintah selama ini belum mengeluarkan payung hukum mengenai tata cara perekrutan Satpol PP menjadi PNS. Tidak ada payung hukum yang mengakomodir kami yang non PNS menjadi PNS. Tuntutan kami, Pemerintah dapat membuat payung hukum tentang pengangkatan kami, Banpol PP atau Satpol PP Non PNS untuk diangkat menjadi PNS Satpol PP, dengan pertimbangan peraturan perundangan yang berlaku,” jelas Riswan.

Riswan menjelaskan, setidaknya ada 36 ribu Satpol PP di seluruh Indonesia

yang statusnya bervariasi, ada yang Pegawai Tidak Tetap (PTT), ada yang Tenaga Kerja Kontrak, tenaga sukarela, *outsourcing*, bahkan *freelance*.

“Efek yang kami rasakan, tidak ada standarisasi dalam memberikan gaji, karena ditentukan kemampuan dae-

rah. Solusi yang terbaik adalah Satpol PP Non PNS ini diangkat menjadi PNS. Sehingga tidak ada keluhan lagi mengenai penghasilan yang di bawah UMP, tuntutan jaminan kesehatan dan tidak ada lagi keraguan saat bertugas, yang menimbulkan resiko,” jelas Riswan.

Riswan dan pihaknya berharap agar tuntutannya ditindaklanjuti kepada Komisi II, dan segera dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN RB. (sf)/foto:iwan armarias/parle/iw.

Ketua DPR RI Buka *Workshop* Penguatan Badan Legislasi



Ketua DPR RI Setya Novanto

Ketua DPR RI Setya Novanto membuka *Workshop* tentang penguatan Badan Legislasi menuju peningkatan kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diselenggarakan Badan Legislasi DPR RI.

“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang menginisiasi pelaksanaan *workshop* ini,” kata Setya Novanto dalam sambutannya di Pustakaloka Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2015)

Ia menyatakan, fungsi legislasi DPR merupakan salah satu fungsi penting yang secara konstitusional mendapatkan penguatan melalui beberapa kali perubahan terhadap UUD 1945. “Perubahan UUD 1945 telah mengubah pendulum kekuasaan membentuk Undang-Undang dari pemerintah kepada DPR sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi tersebut, kata Novanto, maka memang mau tidak mau DPR harus menunjukkan kinerja yang baik di bidang pembentukan Undang-Undang.

“Keberadaan Badan Legislasi yang menjadi alat kelengkapan khusus di bidang pembentukan Undang-Undang patut mendapat perhatian, sebab Badan Legislasi sejak awal dibentuk sebagai *center of law*-nya DPR RI,” tutur Novanto.

Menurutnya, Badan Legislasi merupakan pusat dan kekuatan dari fungsi legislasi DPR. Dimana Badan Legislasi ini menjaga dan menjamin kualitas Undang-Undang untuk

kepentingan kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Demikian juga dari segi jumlah RUU yang dihasilkan, Badan Legislasi berperan untuk mendorong dan menggerakkan komisi-komisi untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU,” terang anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur tersebut.

Namun, tegas Novanto, baik dari segi jumlah maupun kualitas hasil pembentukan Undang-Undang selama ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. “Masyarakat masih memberikan rapor yang kurang baik kepada DPR, baik dari segi jumlah atau kuantitas, maupun dari segi kualitas,” ungkapnya.

Novanto menjelaskan, dari segi jumlah RUU yang disahkan menjadi Undang-Undang masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional. Demikian juga dari segi kualitas, masih banyak Undang-Undang yang mendapatkan penolakan dari masyarakat dan berujung pada pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui *workshop* ini ia mengharapkan, dapat menghasilkan berbagai masukan untuk penyempurnaan mekanisme pembentukan Undang-Undang. Khususnya untuk tahap perencanaan yaitu penyusunan Prolegnas, tahap penyusunan RUU di DPR RI dan tahap pembahasan bersama pemerintah.

“Sedangkan, khusus mengenai penguatan Badan Legislasi diharapkan dapat memperoleh masukan selain menyusun prolegnas, juga tentang sosialisasi, pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan kegiatan sinkronisasi maupun harmonisasi serta pemantapan konsep RUU sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Novanto juga meminta perhatian Badan Legislasi untuk berkoordinasi dan melakukan evaluasi terhadap komisi-komisi pada saat ini dengan melakukan berbagai terobosan proses pengambilan keputusan dalam pembentukan undang-undang agar rakyat tidak perlu menunggu terlalu lama proses dan hasil kerja DPR di bidang legislasi.

Workshop penguatan Badan Legislasi menuju peningkatan kinerja legislasi DPR RI diselenggarakan Badan Legislasi DPR RI di Pustakaloka Gedung Nusantara IV DPR RI. Hadir sebagai narasumber antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Bagir Manan dan Irman Putra Sidin. Sedangkan sebagai penyeimbang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri dan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). (sc), foto : naefurodjie/parle/hr.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Mahasiswa sebagai kaum intelektual, harus memberikan kontribusinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para cendekiawan dan mahasiswa tidak boleh terlalu gelisah melihat perkembangan demokrasi di Indonesia. Mereka dituntut berpikir secara konseptual, dan menyampaikan studi yang diperlukan oleh Anggota Dewan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menerima Forum Komunikasi Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Forum Wacana IPB), di Operation Room, Gedung Nusantara,

Mahasiswa Harus Perkuat Riset dan Data

Senin (13/04/15). Dalam pertemuan ini, Fahri didampingi Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko.

“Mereka harus perkuat risetnya, jangan emosional, dan jangan galau. Kalau datanya diperkuat, pasti akan ditangkap secara baik oleh Anggota Dewan. Anggota Dewan juga harus siap mendengar dari segala arah, supaya ini menjadi bahan kita untuk mengadvokasi persoalan masyarakat kepada pemerintah dalam rapat Dewan,” jelas Fahri.

Politisi F-PKS ini menambahkan, dalam kehidupan demokrasi, keterbukaan membuat simpang siur keadaan. Sehingga tantangannya dalam demokrasi, Pemerintah harus semakin kuat, supaya dalam kebebasan yang ada itu tetap harus ada arahnya.

“Jadi wajar kalau mahasiswa dan kaum intelektual banyak yang gelisah karena kadang-kadang respon pemerintah khususnya eksekutif terhadap keadaan itu terlalu lemah, sehingga

mereka menganggap situasi ini tidak terkendali. Itu penting didengar dan diketahui oleh pemerintah,” imbuh Fahri.

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat ini berpesan, jangan ada rasa pesimisme terhadap demokrasi yang selama ini sudah dibangun. “Harus ada rasa optimisme. Kita lihat ke depannya, apa yang bisa kita perbaiki dan kita koreksi,” tukas Fahri.

Sebelumnya, ada perwakilan mahasiswa yang menyampaikan beberapa hal tentang kondisi Indonesia. Mereka juga menuntut dan menagih janji Anggota Dewan yang sudah duduk di Senayan, salah satunya mengenai biaya pendidikan yang semakin mahal, dan kemiskinan yang masih cukup merajalela.

Usai acara, Fahri memberikan cinderamata kepada perwakilan forum, dan diakhiri dengan foto bersama. (sf),
foto : iwan armanias/parle/hr.

DPR Apresiasi Bantuan Oman Bagi WNI di Yaman

Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan apresiasi kepada Kesultanan Oman yang telah memberikan bantuan tempat transit bagi Warga Negara Indonesia yang ingin keluar dari wilayah konflik di Yaman. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Oman untuk Indonesia di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/15).

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Oman yang telah memberikan kemudahan transit bagi mahasiswa dan Warga Negara Indonesia keluar dari wilayah konflik di Yaman,” kata dia.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut hubungan kerja sama Indonesia dengan Oman, sudah berlangsung sejak lama dan masih dapat ditingkatkan. Secara khusus ia juga memaparkan hubungan baik parlemen dua negara yang saling mendukung dalam pertemuan organisasi parlemen internasional.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengajak Pemerintah Oman untuk berinvestasi di Indonesia. Peluang bagi negara kecil yang kaya ini cukup besar seperti di bidang infrastruktur dan energi.



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat tangan dengan Duta Besar Oman

Sementara itu Dubes Kesultanan Oman untuk Indonesia Sayyid Nazar bin Al Julandi bin Majid Al Said menjelaskan negaranya sangat mencermati perkembangan konflik yang terjadi di negara tetangga Yaman. Menurutnya telah ditetapkan kebijakan bagi mahasiswa Indonesia yang keluar dari Yaman dapat transit di Oman tanpa harus mengurus visa sebelumnya.

Ia juga menyebut Pemerintah Oman mempelajari sejumlah



peluang investasi di Indonesia. Dalam konteks kerja sama kemanusiaan negaranya sudah memberikan dukungan bagi Provinsi Aceh dan Sumbar untuk bangkit pasca bencana de-

ngan membantu pembangunan perumahan, sekolah, mesjid dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya. (iky)/foto:andri/parle/iw.

Fadli Zon Minta Komisi I Dalami Kematian Dua Prajurit TNI AL



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aspirasi orang tua dari Serma Bek Dian al Friansyah

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aspirasi orang tua dari Serma Bek Dian al Friansyah yang melaporkan sejumlah kejanggalan terkait laporan meninggal putranya saat melaksanakan tugas sebagai prajurit TNI AL. Komisi I sebagai mitra TNI diminta melakukan investigasi untuk mendalami laporan ini.

“Kalau ada dua orang anggota TNI AL meninggal dalam tugas seharusnya mendapat penghargaan upacara militer. Ada sejumlah keganjilan yang dilaporkan orang tua, kita akan teruskan kepada Komisi I untuk menginvestigasi kasus ini,”

katanya dalam pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/15).

Dalam kesempatan itu Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut telah menerima surat balasan yang berisi klarifikasi dari Panglima TNI terkait meninggalnya dua prajurit TNI AL. Serma Bek Dian al Friansyah dan Kelasi Edi dinyatakan meninggal dalam aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah nelayan Thailand.

“Dalam surat dari Panglima TNI dijelaskan para pelaku sudah disidangkan di pengadilan Thailand dan vonis hakim hukuman maksimal penjara seumur hidup,” paparnya sambil menunjukkan beberapa lembar surat kepada wartawan.

Dalam keterangannya Habib Djufri Ali Al Habsyi menjelaskan sejumlah kejanggalan pasca menerima kabar meninggalnya sang putra. Ancaman dari atasan di TNI AL untuk tidak mempertanyakan kasus yang mengakibatkan putranya meninggal, jasad sang putra tidak ditemukan tetapi dompet dan telepon genggamnya dikembalikan dan sejumlah kejanggalan lain.

Ia mengaku sudah mengadukan hal ini kepada sejumlah instansi terkait seperti Kasal, Panglima TNI, Menhan dan Komnas HAM. Namun sejauh ini tidak ada tindak lanjut yang memuaskannya.

“Pimpinan TNI AL menyerahkan pakaian, dompet dan hp anak saya diserahkan saat saya dipanggil ke markas, kalau meninggal dalam tugas kenapa tidak ada penghormatan yang layak. Alasan yang saya terima adalah karena keluarga,” tutur dia. (iky)/foto:andri/parle/iw.

DPR Desak PLN Susun Struktur Biaya Harga Listrik

Komisi VII DPR mendesak PT PLN untuk membuat dan menyusun struktur biaya harga listrik secara transparan. Dengan cara ini diharapkan dapat menentukan harga listrik dari sisi struktur cost dan keuntungannya. Pasalnya, selama ini PLN terus mengalami kerugian bahkan mencapai Rp. 1,3 Triliun.

“PLN merupakan perusahaan besar karena itu perlu disusun sistem biaya dan perlu juga dibenahi sistem kekuasaan Direktur PLN yang terlalu besar,” ujar anggota Komisi VII DPR Iskan Qulba Lubis dari Fraksi PKS, di Jakarta, (15/4).

Menurutnya, di negara maju seperti AS ketika menentukan harga listrik ada

struktur cost yang jelas dan transparan. “Ini nantinya korupsinya bisa dari kebijakan misalnya, listrik dari Sulawesi di kirim dari Sumatera, padahal ini bisa dibuat lebih murah,” jelasnya.

Dia menambahkan, Komisi VII DPR juga akan meminta data lengkap bagaimana struktur keuntungan PLN dibandingkan penggunaan valas dari sisi operasionalnya. “Jika memakai valas berapa kerugiannya. Jangan sampai nantinya permainan finansial PLN tetapi dibebankan kepada negara,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur PLN Sofyan Basir mengatakan, PLN telah melakukan berbagai efisiensi



Anggota Komisi VII DPR Iskan Qulba Lubis

yakni menekan biaya produksi listrik dengan mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak ke gas dan batu bara yang harganya bisa lebih murah.

Perusahaan listrik pelat merah itu

sebelumnya disebut-sebut menderita kerugian sekitar Rp 1,3 triliun dalam beberapa bulan terakhir karena belum diterapkannya tarif *adjustment* atau penyesuaian tarif untuk dua golongan rumah tangga itu. Terlebih, jumlah pelanggan di kedua golongan tersebut mencapai jumlah 8,8 juta pelanggan.

Kerugian semakin besar akibat terus melemahnya nilai

tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir, yang menjadi salah satu indikator dalam penyesuaian tarif listrik nonsubsidi saat ini. “Dengan efisiensi ini, biaya yang kemarin per tiga bulan keluar Rp 1,3 triliun itu nampaknya menurut hemat kami sangat bisa kami cover (atasi) dengan efisiensi karena ada perpindahan BBM ke batubara,” katanya. (Si)

Timwas TKI Minta Pemerintah Data Ulang TKI yang Berkasus



Anggota Tim Pengawas TKI DPR, Ahmad Zainuddin

Anggota Tim Pengawas TKI DPR, Ahmad Zainuddin mendukung langkah pemerintah yang memprotes keras Kerajaan Arab Saudi atas pelaksanaan

eksekusi mati tersebut.

“Kami mendukung sikap Menlu yang sudah layangkan protes keras. Kalau perlu, Menlu panggil Dubes Arab Saudi untuk meminta klarifikasi kenapa eksekusi itu terkesan sepihak, tidak ada pemberitahuan ke kita,” ujar Zainuddin di Jakarta, Rabu (15/4).

Zainuddin mengatakan, Kementerian Luar Negeri harus segera melakukan pendataan ulang di lapangan terkait kasus-kasus hukum yang membelit WNI di Arab Saudi. Jangan sampai kasus Zainab yang dieksekusi mati tanpa pemberitahuan sebelumnya, terulang lagi. Zainuddin menyayangkan sikap Kerajaan Arab Saudi yang tidak mengindahkan pemerintah RI.

Ketua DPP PKS ini juga mengatakan, melihat kasus permohonan maaf dan tebusan diaturnya yang menunggu

ahli waris tunggal berusia baligh 13 tahun sejak 1999, apakah ada kelalaian dari pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada keluarga waris?

“Saya ingin minta kepada Kemenlu kita, berapa sih WNI kita yang terancam hukuman mati di sana, bagaimana proses hukumnya saat ini, langkah pembelaan apa yang sudah dilakukan. Saya khawatir kasus seperti Zainab ini banyak dan sudah terjadi sebelumnya. Hanya kasus ini saja yang terekspose,” jelas Zainuddin.

Meskipun demikian, menurut Zainuddin, hukuman mati dalam kasus pidana yang berlaku di Arab Saudi bisa dipahami dan harus dihormati. Namun pembelaan terhadap WNI yang terjerat pidana tetap harus dilakukan. (Si)

DPR Desak Menteri KLH Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mendesak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya agar menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

Menurut Andi, reklamasi teluk Jakarta bertentangan dengan aturan dan kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah. “Hingga saat ini Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan belum mengeluarkan izin reklamasi. Disisi lain, dampak yang akan di timbulkan akibat reklamasi teluk Jakarta ini juga akan semakin memporak-porandakan lingkungan Jakarta dan sekitarnya,” ujarnya kepada Parlemen.

Menurutnya, air akan menjadi ancaman utama jika reklamasi teluk Jakarta di teruskan. Selain banjir yang semakin



Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin

tak terkendali, kualitas air akibat perusakan lingkungan di sekitar proyek akan semakin menyengsarakan warga Jakarta utara dan sekitarnya.

“Reklamasi teluk Jakarta bagi warga Jakarta, kata Akmal, hanya akan dinik-

mati segelintir saja kaum elite borjuis ibukota. Bagi warga mayoritas, itu hanya merupakan tambahan derita masa depan,” tambahnya.

Saat ini, perizinan yang telah keluar sudah usang, bahkan, sudah banyak produk hukum yang telah muncul. Seperti Peraturan Presiden No.54/2008 dan RTRW DKI 2030 yang membuat kepres No.52/1995 menjadi usang. Karena itu, lanjutnya, Pemerintah dan DPR telah sepakat agar reklamasi teluk Jakarta di hentikan segera.

Dia menambahkan, Pemerintah DKI tidak usah ngotot mengejar proyek 500 T jika hanya membuat rakyat Jakarta menderita. “Sudah saja mimpi itu. Jalankan roda pemerintahan sesuai aturan, jangan semaunya sendiri,” jelasnya. (Si) foto:ry/parle/hr

Badan Legislasi Selenggarakan Workshop Penguatan Badan Legislasi



Suasana Workshop Penguatan Badan Legislasi

Badan Legislasi DPR RI (Baleg) hari ini, Rabu (15/4/2015) menyelenggarakan *workshop* penguatan Badan Legislasi menuju peningkatan kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Workshop* dengan tema penguatan fungsi legislasi DPR ini bertujuan untuk mencari masukan dalam rangka meningkatkan kinerja legislasi DPR.

“Tujuan penyelenggaraan *workshop* ini untuk mencari masukan dalam rangka meningkatkan kinerja legislasi DPR serta bagaimana upaya penguatan

Badan Legislasi agar dapat meningkatkan peran Badan Legislasi dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR menjadi lebih signifikan,” kata Ketua Baleg Sareh Wiyono dalam sambutannya di Pustakaloka Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta.

Masukan-masukan dalam *workshop* ini, kata Sareh, akan disusun dalam bentuk *proceeding* yang diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam menentukan langkah selanjutnya dalam upaya penguatan fungsi legislasi Badan Legislasi DPR.

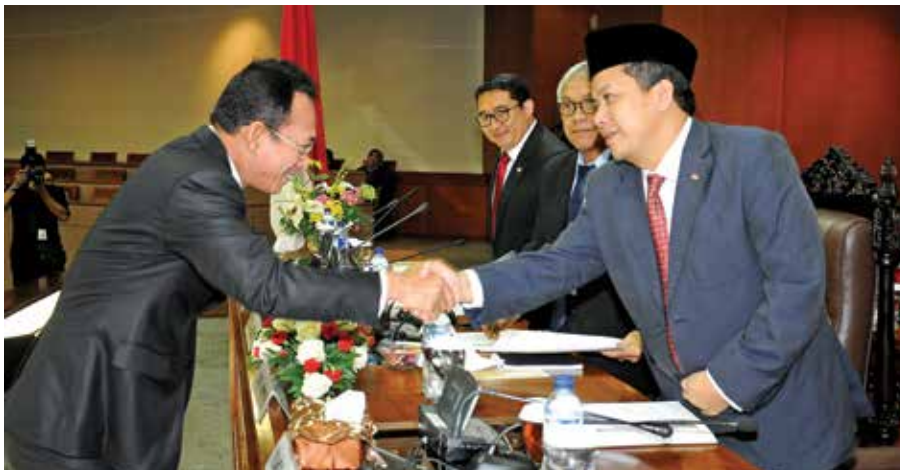
Dijelaskan Sareh, *workshop* yang diselenggarakan selama satu hari ini, dilaksanakan dalam dua sesi dengan menghadirkan para pakar sebagai narasumber untuk setiap sesi serta pembanding pada setiap sesinya.

Sementara peserta *workshop* ini terdiri dari pimpinan/anggota komisi, pimpinan/anggota Badan Legislasi, Panitia Perancang Undang-Undang DPD, para peneliti, perancang Undang-undang, tenaga ahli alat kelengkapan dewan, dan tenaga ahli anggota DPR RI.

Dan narasumber dalam kegiatan *workshop* ini, antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Bagir Manan, Irjen Polisi Djoko Prastowo, Irman Putra Sidin, dan Pataniari Siahaan. Dalam *workshop* ini juga diundang dua lembaga sebagai pembanding yaitu Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Sareh mengharapkan, partisipasi dan sumbangan pemikiran dari para peserta. “Pemikiran yang disampaikan dalam kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya kita bersama untuk menata sekaligus meningkatkan kinerja legislasi DPR,” harapnya. (sc), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR Sahkan KAP Wisnu B Soewito dan Rekan Menjadi Pemeriksa Keuangan BPK



Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Kantor Akuntan Publik Wisnu B Soewita & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2014.

“Apakah KAP Wisnu B Soewita & Rekan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK RI tahun 2014 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (14/04). Jawaban setuju pun di-

berikan oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan fit and proper test kepada lima calon KAP yang telah diajukan oleh Kementerian Keuangan dan BPK RI.

Politisi F-Gerindra ini menjelaskan, Kementerian Keuangan mengajukan tiga calon KAP, yaitu KAP Heliantono & Rekan, KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, & Ali, serta KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan.

Sementara itu, BPK juga mengaju-

kan tiga calon KAP, yaitu KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, KAP Wisnu B Soewito & Rekan, dan KAP Dra. Suhartati & Rekan.

“Dari kedua usulan tersebut, KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan diusulkan oleh pihak BPK dan Menteri Keuangan, sehingga keseluruhan calon berjumlah lima KAP,” jelas Gus Irawan.

Menindaklanjuti usulan tersebut, Komisi XI DPR mengadakan fit and proper test pada 26 Maret 2015 kepada lima calon KAP. Kemudian dilakukan rapat intern Komisi pada 30 Maret untuk melakukan pengambilan kepu-

tusan.

“Setelah mendengarkan pandangan, pendapat dan pertimbangan dari masing-masing fraksi, Komisi XI DPR memutuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan usulan dari fraksi-fraksi menunjuk KAP Wisnu B Soewito & Rekan sebagai KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK tahun 2014,” jelas Politisi asal Dapil Sumatera Utara II ini. (sf), foto : iwan armanias/parle/hr.

Legislator Dukung Dibentuknya Polisi Parlemen

Anggota DPR Roem Kono menyetujui usulan dibentuknya polisi parlemen. Saat ditemui di sela-sela Rapat Paripurna Selasa(14/04), politisi Partai Golkar ini menyatakan sangat diperlukan suatu peraturan pengamanan yang jelas mengenai pengamanan, karena Gedung DPR adalah tempat untuk membahas perundang-undangan dan masalah anggaran negara Rp 2.000 triliun lebih. Gedung DPR juga dimanfaatkan untuk menerima tamu-tamu negara, serta tempat diadakannya event-event internasional.

“Sebentar lagi kita mempunyai event besar, pada tanggal 23 April ada hajatan pertemuan parlemen Asia Afrika. Ini kan perlu pengamanan, tamu-tamu negara, Kita tidak boleh lengah masalah pengamanan. Situasi dunia sekarang sangat berbahaya, sehingga diperlukan polisi parlemen,” ungkap anggota DPR dari Dapil Gorontalo ini.



Ketua BURT DPR Roem Kono

Saat ditanya tentang peran Pamdal, ia menyangkan peran Pamdal selama ini kurang reaktif saat ada kejadian-kejadian yang genting. “Waktu Rapat Paripurna pengambilan keputusan pemilihan Pimpinan DPR beberapa waktu

lalu, bagaimana pamdal tidak reaktif dan membiarkan begitu saja anggota DPR yang naik-naik ke panggung,” ungkap Ketua BURT ini.

Sedangkan jumlah personil polisi parlemen, dia menyatakan, itu masalah teknis dan belum sampai membicarakan mengenai hal itu. “Bisa saja orang-orang berwacana, tetapi belum kita bicarakan, yang kita atur adalah sistemnya. Saya sudah memberikan masukan ke Baleg, nanti mereka akan membahas,” terang dia.

Terkait masalah anggaran, kata Roem Kono, anggaran keamanan memang sudah ada setiap tahun, tetapi rencana ini belum masuk dalam anggaran tahun 2015. Menurutnya masih akan dikaji lebih dalam lagi dan nanti akan dilihat bagaimana kedepannya, setelah itu baru nanti akan dibawa ke Rapat Pimpinan,” tambah Roem Kono. (mp,gt) foto : iwan armanias/parle/hr.

DPR Minta Pemerintah Serius Bahas RUU Tapera



Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana dan Anggota Komisi V DPR dalam acara Forum Legislasi

Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana berharap pemerintah serius dalam membahas Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera). Gagalnya disahkannya RUU Tapera pada DPR periode 2009-2014 lantaran ketidakseriusan dari pihak pemerintah.

“Padahal jika kita serius mengelola Tapera ini akan menghasilkan dana yang luar biasa besar dan besar pula manfaatnya untuk rakyat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan perumahan rakyat ini,” kata Yudi dalam acara forum legislasi RUU Tapera bersama mantan Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi, dan Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Hanura Fauzih Amro di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4).

Menurut Yudi, keinginan pemerintah untuk membangun sejuta rumah rakyat hanya akan menjadi mimpi, jika peme-



rintah tidak serius dalam membahas dan menganggarkan Tapera itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan, program sejuta rumah itu membutuhkan dana yang tak sedikit, yakni sekitar Rp88,5 triliun.

Padaحال dalam APBN, pemerintah melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya mengalokasikan Rp5,1 triliun per tahun untuk membangun perumahan. Kekurangan dana tersebut menyebabkan program pembangunan sejuta rumah hanya menjadi angan-angan saja bagi pemerintah.

Di tempat yang sama, mantan Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi mengatakan, RUU ini merupakan warisan dari DPR periode sebelumnya. Dalam periode 2009-2014 itu, RUU tidak dapat disahkan lantaran di internal pemerin-

tah belum menyepakati mengenai persentase pembiayaan Tapera yang diwajibkan.

Ia berharap, dalam periode ini RUU dapat disahkan menjadi UU. Menurut politisi dari FPDIP itu, RUU tinggal sedikit lagi sah menjadi usul inisiatif DPR. Komisi V DPR telah melayangkan surat kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk segera mengharmonisasikan RUU ini. Menurutnya, Baleg menyambut baik surat tersebut.

“Akan ditentukan di paripurna jadi RUU inisiatif dewan. Kalau disetujui, akan dikirim ke presiden, lalu presiden ke luaran amanat presiden dan menunjuk menteri siapa yang akan bahas hal ini,” ujarnya. (nt/sc)

Dewan Menyetujui Peraturan Tata Tertib DPR

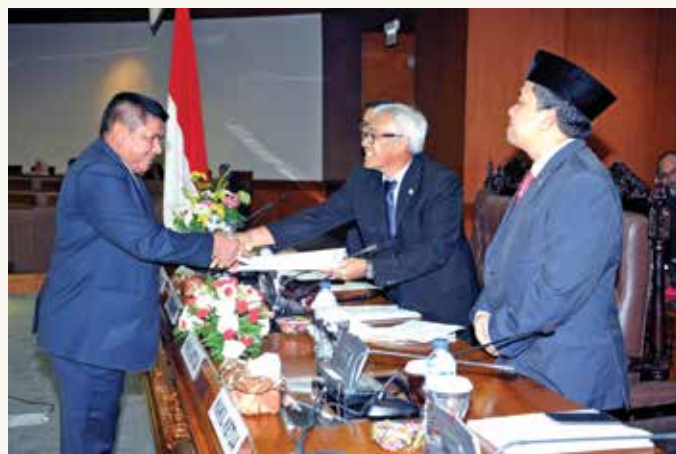
Rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menjadi Tata Tertib DPR RI.

“Sekali lagi, apakah laporan Ketua Badan Legislasi tentang pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 dan untuk selanjutnya disetujui menjadi Tata Tertib DPR RI,” kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Secara serentak, seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan persetujuannya. “Setuju.”

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Sareh Wiyono menyampaikan laporan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Menurut Sareh, perubahan terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib diperlukan dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja lembaga



Ketua Badan Legislasi DPR RI Sareh Wiyono menyampaikan laporan pembahasan Tata Tertib DPR kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

perwakilan rakyat dengan menata kembali tata cara pelaksanaan hak anggota dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal.

“Perubahan juga dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi khususnya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” kata Sareh. (sc), foto ; iwan armanias/parle/hr.

Komisi II DPR Minta IPDN Buat Blueprint Kampus

Komisi II DPR meminta IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) segera membuat Blue Print untuk pembangunan pengembangan kampus kedepan. Hal itu mengemuka saat Komisi II melakukan Kunjungan Kerja ke Sumatera Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, Senin, (14/4).

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menambahkan,

Soal *Blueprint* bisa dikomunikasikan bersama dengan Komisi II DPR. “Mengenai *blue print* itu sebenarnya bisa dikomunikasikan bersama-sama terlebih dahulu dengan Komisi II DPR bersama IPDN. Begitu sudah final maka kita sudah bisa menargetkan sampai tahun berapa bisa menyelesaikan pembangunan IPDN tersebut,” jelas Lukman.

Lukman Edy mengemukakan, pertemuan antara Komisi II DPR dengan IPDN dari mulai Rektor dengan seluruh jajarannya, ingin mendengarkan masukan dan program serta presentasi dari IPDN mengenai blue print dari pembangunan pengembangan kampus IPDN kedepannya

“Semua ini harus jelas dan transparan termasuk dalam melengkapi infrastrukturnya seperti apa, membutuhkan anggaran berapa, kemudian pembangunan budaya akademisnya seperti apa, dan diharapkan IPDN sejajar dengan perguruan

tinggi lainnya, dukungan seperti itulah yang akan diberikan Komisi II terhadap IPDN. Contohnya disetiap Kampus seperti Kampus IPDN Jatinangor maupun kampus IPDN di daerah-daerah perpustakaan harus ideal minimal didalam perpustakaan tersebut judul buku bacaan harus diatas sepuluh ribu judul buku yang ada dalam perpustakaan, sementara buku-buku yang ada di perpustakaan IPDN Padang masih dibawah sepuluh ribu judul buku, ini masih sangat kurang dan harus segera dilengkapi,” jelasnya.

Lukman Edy memberikan contoh lain setiap kampus IPDN diseluruh Indonesia juga harus memiliki sarana dan prasarana olahraga yang lengkap seperti kolam renang, lapangan bola, lapangan futsal, lapangan voli, lapangan basket dan lain sebagainya dan hal itu merupakan sebuah standar kampus juga harus sama diseluruh kampus se-Indonesia.

Dikatakan juga, lanjut Lukman, Komisi II DPR telah merekomendasikan dan meminta supaya IPDN terus mempertahankan kedisiplinannya, namun tanpa kedisiplinan yang bersifat militeristik.

“Komisi II DPR memberikan dukungan agar ada kepastian karir bagi alumni IPDN, kalau misalnya nanti ada kebijakan dari Menteri Dalam Negeri untuk membuat peraturan Men-



Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy

teri, atau bentuk peraturan lain, yang akan memberikan peluang karir bagi alumni IPDN Komisi II sudah dipastikan akan mendukung secara penuh diberikan kepada IPDN,” jelasnya.

(Spy) foto: supriyanto/parle/hr

Workshop Penguatan Penelitian Dorong Parlemen Lebih Maju



Suasana Workshop Penguatan Penelitian dan Tenaga Ahli Parlemen Negara Asean

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Teguh Juwano mengatakan, *workshop* Penguatan Penelitian Parlemen yang digelar Selasa – Rabu (14-15/4) di lantai IV Gedung Nusantara III, dilakukan Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) didukung Kedutaan Jerman di Indonesia dan GIZ. *Workshop* ini sangat penting karena pesertanya adalah para tenaga ahli dan peneliti dari Parlemen Negara-negara Asean.

Menurutnya, seri *workshop* yang terus berlangsung ini semacam pelatihan

yang sangat bermanfaat guna mendukung upaya parlemen negara-negara Asean untuk menjadi parlemen yang lebih modern. Dalam dua hari ini akan dibicarakan tentang penguatan organisasi dan struktur dukungan terhadap parlemen dan para anggota parlemen.

“Nanti akan membuat *action plan*, kemudian akan diimplementasikan lebih maju lagi. Tiga bulan ke depan akan membuat *workshop internet for Parliament*. Jadi akan ada tukar pengetahuan dan pengalaman para peneliti dan tenaga ahli parlemen Asean se-

hingga dapat memberikan dukungan kepada parlemen,” jelasnya.

Karena itu sambung dia, *workshop* ini akan benar-benar bermanfaat untuk pembangunan sarana-prasarana pendukung agar parlemen kita menjadi parlemen lebih baik ke depan. Ia menegaskan, dalam acara ini tidak ada pembahasan terkait isu-isu yang kini mencuat, namun untuk membangun parlemen di negara-negara Asean ini menjadi lebih maju. Apalagi di tahun ini kita sudah menyepakati Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Komunitas Asean.

“Jadi tidak berbicara soal isu-isu yang berkembang tetapi lebih bagaimana membangun organisasi yang baik guna mendukung parlemen yang lebih akuntabel. Membangun struktur parlemen yang lebih tepat, lebih efisien didukung teknologi canggih,” ujarnya dengan menambahkan bahwa ke depan kita akan menjadi kawasan bebas Asean.

Tentang peran Kedubes Jeman, Teguh menjelaskan mendukung pendanaan, dan BKSAP DPR menjadi tuan rumah karena Sekretariat Jenderal Parlemen Asean ada di Jakarta. Sementara fasilitatornya dari Australia, karena itu diharapkan para peneliti

dan tenaga ahli Indonesia selain berbagai pengalaman juga bisa dimanfaatkan untuk membangun *network* (jejaring) dengan para tenaga ahli dan peneliti parlemen Asean.

Dengan demikian, dukungan para

peneliti dan tenaga ahli akan sangat vital bagi pembangunan parlemen yang lebih baik, sekaligus peningkatan komunikasi yang makin intensif antar anggota parlemen di kawasan Asean. Hadir dalam acara ini antara

lain Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Sekjen AIPA P.O Ram JP. (mp), foto : *riska arinindya/parle/hr*.

Peralatan Patroli Polisi di Kepri Masih Minim



Tim kunjungan spesifik Komisi III DPR di Natuna

Sarana dan prasarana Polisi Air di Kepulauan Riau sangat minim, khususnya di Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah terluar Indonesia yang berbatasan dengan tiga negara. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan spesifik Komisi III DPR RI ke Kabupaten Natuna, Senin (13/4).

“Kedatangan kami ke Natuna ini untuk menyerap aspirasi masyarakat serta pemerintah daerah setempat terkait permasalahan yang ada di Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Natuna ini,” ungkap Ketua Komisi III,

Aziz Syamsudin.

Aziz menjelaskan bahwa dari diskusi yang dihadiri oleh Kapolda Kepulauan Riau, Amran Depari, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri, dan Bupati Natuna, Ilyas Sabli beserta jajarannya itu diketahui bahwa di daerah tersebut khususnya di Natuna tidak sedikit terjadi *Trans National Crime* atau kejahatan lintas negara, salah satunya *illegal fishing*.

Sayangnya hingga saat ini pihak kepolisian mengaku masih belum bisa seutuhnya menumpas *illegal fishing*

yang dilakukan oleh kapal dan nelayan asing. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kapolda Kepri, Amran Depari, jumlah personil kepolisian di Provinsi Kepulauan Riau ini hanya berjumlah 4.500 orang, padahal wilayah ini ada sekitar 2.400 pulau dimana 400 diantaranya berpenghuni. Dengan begitu setiap pulau masing-masing hanya mendapat pengamanan dua personil polisi.

Tidak hanya itu, peralatan yang dimiliki kepolisian juga masih sangat minim. Bahkan di Kabupaten Natuna yang memiliki banyak pulau sendiri hanya ada satu dua kapal polisi. Tidak jarang polisi meminjam kapal warga untuk melakukan patroli laut.

Menanggapi hal tersebut, Aziz Syamsudin yang didampingi oleh anggota Komisi III lainnya seperti Nasir Djamil, Ali Umri, Andhika Hazruny, Dossy Iskandar mengatakan pihaknya akan segera mendiskusikan hal ini dengan pihak Polri agar ke depan dapat memberikan anggarannya pada program pembelian peralatan yang diperlukan para personil polisi sebagai garda terdepan dalam menghalau para pencuri ikan dari negara lain.

“Tidak hanya sekedar pencurian ikan, namun di situlah terletak martabat bangsa kita di mata negara lain. Oleh karena itu, sudah saatnya polisi yang berada di garda terdepan harus dipersenjatai dengan peralatan yang lengkap,” papar Aziz. (Ayu) foto: *ayu/parle/hr*

BURT Berdialog dengan RS Provider di Palu

Badan Urusan Rumah Tangga - BURT DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulteng untuk mendengar dan menghimpun masukan terkait pelaksanaan Perpres no.68/2014 tentang Program Jaminan Kesehatan bagi Pejabat Negara. Fokus kunjungan adalah RS Woodward yang telah bekerja sama dengan BUMN Jasindo sebagai Badan Penyelenggara.

“Kita ingin mendengar langsung,

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi anggota DPR RI beserta keluarganya. Silahkan disampaikan secara terbuka, tidak perlu sungkan,” kata Ketua Tim Kunjungan Agung Budi Santoso, di Palu, Sulsel, Rabu (15/4).

Menurut politisi dari FPD ini ada masukan dari anggota dewan yang masih menemui hambatan pada saat

implementasi layanan di RS provider baik di Jakarta maupun di daerah. Hal ini disinyalir karena program ini belum tersosialisasi dengan baik kepada rumah sakit terkait.

Anggota BURT dari FPKS Ansory Siregar mengatakan keberadaan RS provider di daerah sangat penting karena mobilitas anggota dewan yang sangat tinggi terutama saat melakukan kunjungan pengawasan ke

daerah-daerah. Ia berharap ada prosedur standar baik dari segi pelayanan maupun peralatan sehingga upaya penyelamatan dalam kondisi darurat bisa berhasil optimal.

Ia kemudian menyebut peristiwa kecelakaan yang dialami rombongan Kunker Komisi V dalam perjalanan dengan bus di Jawa Tengah. Dalam peristiwa tragis itu seorang anggota dewan gugur dalam tugas. Kecelakaan lain juga pernah terjadi di Manado, Sulut, pada saat rombongan anggota Komisi III mengalami kecelakaan di laut.

“Kita ingin memastikan layanan RS di daerah bisa memiliki standar yang sama, cepat dan sigap dalam pelayanan serta didukung peralatan yang memadai. Nah itu yang ingin kita pastikan dalam kunjungan lapangan kali ini,” tutur dia.

Sementara itu Tim Kunjungan dari Fraksi Partai Golkar A.A. Bagus Adi Mahendra Putra menyebut salah satu tantangan Jasindo sebagai penyelenggara sesuai Permenkeu no. 167/2014



Tim Kunjungan BURT DPR disambut manajemen RS Woodward, Palu, Sulteng

adalah, bagaimana menyamakan pelayanan di RS provider yang berada di pusat dengan di daerah. Namun ia meyakini kekuatan rumah sakit di daerah adalah pelayanan dengan hati nurani.

Dalam penjelasannya Direktur RS Woodward dr. Merdy C. Kumaat, MHA mengatakan, siap memberikan

layanan terbaik. Kerja sama dengan Badan Penyelenggara PT Jasindo saat ini sudah berjalan dan sejumlah data masih terus diaktualisasikan. Ia mengajak Tim Kunjungan BURT untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas rumah sakit seperti ruang operasi/bedah, fasilitas CT Scan, UGD dan fasilitas lainnya. (iky) foto: ibnur khalid/parle/hr

BURT Dorong RS Peserta Jamkestama Layani BPJS

dapat dinaikkan sehingga dapat memberikan nafas segar kepada lembaga asuransi negara yang baru berdiri ini.

Bicara pada kesempatan yang sama Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti menyebut layanan asuransi kesehatan bagi pejabat negara termasuk anggota DPR diharapkan dapat mendukung kinerja. Layanan RS provider juga dapat memberikan rasa tenang terutama bagi anggota dewan yang tidak membawa keluarganya ke Jakarta.

“Anggota dewan tenang bekerja karena anak atau istri yang mungkin tidak ikut ke Jakarta juga mendapat perlindungan asuransi,” tutur dia. Wakil rakyat dari FP Gerindra ini juga meminta pihak manajemen RS menyampaikan laporan tentang kendala program yang dilaksanakan oleh BUMN Jasindo ini.

Dalam penjelasannya Direktur RS Woodward dr. Merdy C. Kumaat, MHA menjelaskan pelayanan BPJS di rumah sakit yang dipimpinnya sedang dihentikan sementara. Salah satu penyebabnya adalah temuan pemberian obat paten yang tidak didukung BPJS.

“Saya harus mengakui ada salah pemahaman tetapi sekarang kita sedang berupaya membuka kembali layanan BPJS di rumah sakit ini, prosesnya sedang berlangsung. Sudah sejak lama pasien Askes sudah menjadi pelanggan



Tim Kunjungan BURT DPR meninjau fasilitas CT Scan RS Woodward, Palu, Sulteng

Rumah Sakit Provider yang memberikan layanan bagi pejabat negara lewat program Jamkestama (Jaminan Kesehatan Utama) patut juga memberikan perhatian bagi masyarakat peserta BPJS. Hal ini penting dalam membangun keseimbangan, RS tidak semata-mata berorientasi bisnis tapi juga sosial.

“RS Woodward kami harap juga mengikuti program BPJS sehingga dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang lebih luas,” kata anggota Tim Kunjungan Spesifik BURT DPR Irma Suryani Chaniago dalam pertemuan dengan manajemen RS Woodward di Palu, Sulteng, Rabu (15/4).

Saat ini menurut politisi FP Nasdem ini DPR terus berupaya mengawal agar BPJS dapat melayani publik semakin baik. Salah satu bentuk dukungan adalah dengan memberikan lampu hijau agar tarif Penerima Bantuan Iuran



kami, ketika BPJS tidak ada mereka bertanya-tanya,” kata dia.

Ia juga memandu Tim Kunjungan BURT untuk melihat langsung fasilitas RS diantaranya CT Scan dan UGD.

Menurutnya fasilitas kedaruratan di RS ini sudah cukup memadai, apalagi seluruh perawat diharuskan lulus pendidikan khusus. Apabila ada pasien yang perlu dirujuk ke RS yang lebih lengkap,

pihaknya sudah berpengalaman dalam mengelola transportasi udara menuju RS di Makasar bahkan Singapura. (iky) foto: [ibnur khalid/parle/hr](#)

Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta



Suasana RDP Komisi IV DPR dengan Dirjen Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Komisi IV DPR RI mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan atas reklamasi Pantai Utara Jakarta, seperti banjir, konflik sosial, kerusakan ekosistem laut dan tata air, serta dampak sosial. Karena besarnya dampak tersebut, maka Komisi IV mendesak Pemerintah untuk membatalkan perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait un-

tuk membatalkan berbagai proses reklamasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk membatalkan izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, saat RDP dengan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Senin (13/4), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Berdasarkan sumber data dari Pengembangan Pantura Jakarta, total luas Kawasan Reklamasi Pantura sekitar 5.100 Hektar. Patut diketahui pengembangan kawasan pantura Jakarta merupakan bagian dari wilayah yang terintegrasi dari DKI Jakarta, dimana pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan pantura Jakarta merupakan bagian dari system pengelolaan lingkungan yang mencakup mekanisme perencanaan, perijinan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan.

Menurut Herman Khaeron, data yang ada bahwa pengambilan urugan (pasir Laut) dari daerah lain untuk reklamasi, berdampak merusak ekosistem setempat berupa penurunan hasil tangkapan nelayan, kekeruhan pantai dan abrasi pantai, serta terancamnya cagar alam laut Muara Angke yang selama ini berfungsi sebagai ekologi strategis bagi Jakarta. “Ada sisi ekonomis dari pembangunan tersebut, namun juga harus diperhitungkan akan kerugian yang besar,” tegasnya. (as) foto: [rizka/parle/hr](#)

Komisi V DPR Minta INACA Bentuk Tim Inventarisir Persoalan Penerbangan

Komisi V DPR RI meminta INACA membentuk Tim yang melibatkan seluruh maskapai penerbangan nasional guna melakukan inventarisasi seluruh permasalahan di bidang penerbangan nasional dan memberikan usulan perbaikan kepada Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR RI termasuk dalam hal regulasi (UU, PP dan peraturan-peraturan pelaksanaannya).

Demikian salah satu butir kesimpulan RDPU Komisi V DPR dengan Ketua

INACA dan para Direktur Utama Maskapai Penerbangan Nasional, dipimpin oleh Yudi Widiana Adia, Selasa sore, (13/4).

Menurut Yudi, selain itu Komisi V DPR juga meminta tim tersebut nanti menjelaskan seluruh kondisi sarana dan prasarana di sektor penerbangan, serta kebijakan pengembangan sumber daya manusia, yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Mei 2015.

Pada RDPU tersebut, Komisi V DPR RI dan direksi maskapai penerbangan



Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana

nasional yang tergabung dalam INACA (Indonesia National Air Carrier Association) juga sepakat untuk melakukan program peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan penerbangan nasional sehingga kedepannya rating maskapai penerbangan nasional dapat ditingkatkan sesuai standar internasional. (Si) foto: [rizka/parle/hr](#)

DPR Apresiasi Inisiatif DPRD Kutai Kartanegara

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal menyatakan apresiasinya atas inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, karena telah menyampaikan pandangannya tentang Revisi Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sehingga, pandangan ini dapat menjadi masukan bagi DPR untuk membahas revisinya.

“Kita berterima kasih kepada DPRD yang telah berinisiatif untuk menyampaikan dan melengkapi pemikiran-pemikiran terkait penyusunan revisi UU No 33 Tahun 2004. Apalagi, di Prolegnas 2014-2019, revisi UU ini juga sudah ditetapkan menjadi Prioritas tahun 2015,” kata Jon, usai pertemuan di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Selasa (14/05).

Dalam pertemuan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kukar ini, Jon didampingi Anggota Komisi XI Kasriyah (F-PPP/Dapil Kalimantan Timur), dan Anggota Komisi VII Neni Moerniaeni (F-PG/Dapil Kalimantan Timur).

Jon menjelaskan, revisi ini merupakan inisiatif Pemerintah, sehingga diharapkan Pemerintah dapat segera menyampaikan pokok pikiran mengenai revisi UU ini. Sehingga pembahasan dapat dilakukan bersama.

“Kemudian draft dari Pemerintah

dapat kita bahas bersama, sehingga kita juga memerlukan masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari DPRD Kutai Kartanegara ini. Kami apresiasi DPRD dan Pemda Kukar yang juga berinisiatif mengajak daerah penghasil lainnya, untuk menyatukan pandangan, sehingga pandangan itu akan menjadi masukan untuk DPR, dan menyempurnakan UU,” papar Jon.

Politisi F-PAN ini menambahkan, ada catatan menarik yang diambilnya saat pertemuan. Ia menilai positif masukan DPRD Kukar yang menyatakan bahwa revisi mengenai dana bagi hasil ini tidak akan mempengaruhi dana yang didapatkan oleh daerah lain. Jon melihat, jika ini dapat diimplementasikan, maka ini akan menjadi masukan yang berharga untuk revisi UU.

“Mereka juga menyampaikan, soal belum adanya keadilan atau pemerataan dalam dana bagi hasil ini. Mereka meminta juga ada transparansi dalam dana bagi hasil ini, seperti *cost recovery*, sehingga daerah mengetahui porsi untuk daerahnya,” imbuah Jon.

Politisi asal Dapil Riau I ini menyatakan, pemikiran dari daerah, pemerintah, termasuk juga DPR akan dirangkum menjadi satu, sehingga revisi UU ini nantinya dapat menjadi UU yang sesuai dengan harapan semua dan



Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal

membuat Indonesia lebih baik.

“Pembahasan revisi UU ini akan melibatkan lintas komisi dan banyak kementerian. Setelah ini kami akan membentuk pansus, dan membahasnya dengan Pemerintah. Kita harapkan tahun ini dapat diselesaikan revisinya,” janji Jon.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Salehudin, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengawal proses pemikiran revisi UU no 30 tahun 2004 ini sudah cukup lama. Bahkan, pihaknya sudah melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, namun kalah.

“Proses ini sudah cukup panjang. Kita sekarang sudah mendapat informasi yang jelas, apalagi revisi UU 33 Tahun 2004 juga masuk Prioritas Prolegnas 2015. Kami bersama Pemerintah Kukar sudah melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan penguatan, berupa masukan dan pokok pemikiran terkait dengan revisi UU ini,” kata Salehudin.

(sf) foto: denus/parle/hr

Perlu Sinergitas Pusat dan Daerah Tingkatkan Pembangunan Bangsa

Ketua BURT DPR RI Roem Kono mengatakan, sebagai wakil rakyat dalam rangka menunjang pembangunan di daerah, perlu ditingkatkan fungsi kordinasi dan komunikasi antara DPR RI sebagai wakil rakyat dengan Pemerintah Provinsi setempat.

“Dalam salah satu sesi pertemuan dengan Gubernur dan jajaran SKPD di lingkungan Provinsi Gorontalo dikatakan bahwa fungsi kordinasi dan komunikasi antara DPR,” jelas Wakil rakyat dari Dapil Gorontalo kepada Parlemen baru-baru ini.

Saat Kunjungan Reses ke Dapilnya di

Gorontalo, Roemkono menilai, Membangun suatu wilayah dibutuhkan keseriusan semua pihak, apalagi daerah tersebut dalam kategori baru dan masih ketegantungan bantuan dari pemerintah pusat.

“Gorontalo merupakan suatu wilayah yang dalam menjalankan ketercapaian program masih sangat bergantung dengan bantuan pemerintah pusat,” paparnya.

Sebagai putra daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Gorontalo, dalam reses beberapa waktu lalu, Roem Kono telah melakukan

kunjungan ke beberapa wilayah dan berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pembangunan antara pusat dan daerah, putra Bone Bolango ini melakukan temu koordinasi dengan instansi Pemerintahan, seperti Provinsi Gorontalo, Boalemo, hingga Kota Gorontalo. Hal tersebut, lanjutnya, diharapkan menjadi referensi pembahasan antara pemerintah pusat dan DPR RI.

Dia menambahkan, perlu sinergitas antara pusat dan daerah sehingga pembangunan yang dibutuhkan dan



Ketua BURT DPR Roem Kono kunjungi Dapil Gorontalo

pencaanaan proyek-proyek strategis dapat dilaksanakan. “Saya harapkan kerjasama yang kami lakukan ini akan terus berlanjut dan terbina. Jika ini

terus berlanjut dan dijalankan dengan ikhlas, maka Gorontalo akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Memiliki Motto “Pengabdian adalah kunci SUkses” inilah yang menjadikan Roem Kono sangat dikenal di masyarakat Gorontalo sebagai wakil rakyat yang sungguh-sungguh mendorong pembangunan provinsi Gorontalo. Salah satu yang sekarang diperjuangkan adalah menjadikan danau Limboto sebagai Ikon Gorontalo.

Karena perjuangan yang tak kenal lelah ini, Belum lama ini, Radar Gorontalo menganugerahkan Roem Kono “Man of The Year”, hal tersebut sebagai apresiasi masyarakat Gorontalo atas perjuangan dan perhatian dengan kondisi infrastruktur dan pembangunan lainnya di Gorontalo. (Si), foto : [suciati/parle/hr](#).

Program Kerja Kementerian Tenaga Kerja 2015 Dinilai Bagus

Komisi IX DPR menilai program kerja Kementerian Tenaga Kerja RI tahun 2015 bagus, namun Komisi IX mengharapkan implementasi dari program-program yang baik tersebut.

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi hari Senin (13/4/2015) membahas enam program kerja Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2015.

“Hari ini kami Raker dengan Menteri Tenaga Kerja dan kalau melihat dari paparan Menteri saya lihat bagus, program dan roadmapnya bagus. Tinggal pelaksananya. Karena kami paham sekali bahwa pemerintah belum memberikan atensi khusus mengenai bagaimana pembiayaan kementerian itu sendiri. Sehingga akibatnya angka yang dialokasikan untuk kementerian ini masih sangat kecil,” papar Dede disela-sela rapat kerja tersebut di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dijelaskan Dede, jika berbicara mengenai rencana-rencana *grand scenario* seperti yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja pada rapat tersebut, misalnya pembangunan BLK dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi MEA, menurut Dede semuanya bagus.

“Tetapi dengan anggaran yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja, bahkan sampai saat ini jika bicara tentang BLK saja untuk seluruh Indonesia hanya Rp 100 Milyar, kalau dipukul rata semua BLK hanya Rp 300 jutaan per BLK rasanya tidak mungkin, jadi harus ada keseriusan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Untuk masalah pengawasan saja, ia melihat di Kementerian Tenaga Kerja terlalu banyak yang harus diawasi. Mulai dari perusahaan, industri, tenaga kerja asing, bahkan nanti kalau ada RUU PRT harus melakukan pengawasan kepada pembantu rumah tangga juga.

“Ini memerlukan penambahan jumlah pengawas dalam hal ini PPNSnya, saat ini mungkin PPNSnya hanya 150an orang dan ini sangat kurang sekali, integrasi dengan pemda khususnya dengan disnaker-dinsnaker masih sangat kurang,” ungkapnya.

“Tentunya kami DPR mensupport program-program yang baik, namun kita juga harus mengatakan bahwa ini jangan hanya cerita saja harus ada implementasi,” mantap Dede.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan enam pro-



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Efendi

gram kerja Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2015.

Keenam program kerja di bidang ketenagakerjaan tersebut yaitu program pembangunan 10.000 unit Rusunawa dan Rusunami bagi kesejahteraan pekerja, kesiapan pembangunan Rumah Sakit Pekerja/Buruh, pengawasan pemerintah terhadap arus masuk pekerja asing yang bekerja tanpa izin di Indonesia, revitalisasi BLK-BLK di seluruh Indonesia, perbaikan sistem tata kelola penempatan dan perlindungan TKI dan perbaikan tata pengawasan dan pengendalian PPTKIS. (sc) foto: [naefuroji/parle/hr](#)

UN Berbasis Komputer di Maluku Belum Bisa Dilaksanakan



Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR saat pertemuan dengan Wagub. Maluku

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Maluku dalam rangka memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015 online berbasis komputer. Di Maluku sendiri belum diberlakukan ujian berbasis komputer karena terhambat oleh sarana dan prasarana yang belum siap.

Pertemuan Pemprov Maluku dengan Tim Kunker UN Komisi X DPR RI berlangsung Selasa (14/4) malam, di kantor gubernur Prov Maluku. Pihak Pemprov diwakili oleh Wakil Gubernur (wagub) Prov. Maluku, Zeth Sahuburua. Wagub mengatakan UN di Maluku diikuti 28,166 siswa di 699 sekolah. Seluruh peserta

mengikuti UN secara *paper-based*. Dikatakan juga oleh Wagub pada hari pertama UN tidak ada laporan mengenai hambatan maupun kecurangan.

Lebih lanjut ditambahkan Kadisdik Prov Maluku, Mohammad Saleh Thio, bahwa secara geografis Luas wilayah Maluku 712,000 km² di mana 92 persen lautan dan hanya 8 persen daratan yang tersebar di daerah yang relatif luas. Sedangkan pencetakan soal untuk wilayah ini dilakukan oleh PT Prima di Surabaya. Mengantisipasi kondisi tersebut, Disdik provinsi Maluku meminta agar soal UN untuk Maluku didahulukan pencetakannya. Thio me-

nerangkan, soal sudah tiba di Maluku pada 17 Maret, tanggal 22 Maret mulai didistribusikan dan pada 11 April 2015 seluruh soal sudah tiba pada tempat penyimpanan akhir.

Ditambahkan Ketua Tim Kunker komisi X DPR RI H.Dediwahidi dari F-PKB, selain pelaksanaan UN berbasis kertas, Kemdikbud juga melakukan ujicoba pelaksanaan UN berbasis komputer atau “Computer Based Test” (CBT).

Setelah memantau kegiatan UN di Maluku ternyata di Maluku belum di berlakukan UN berbasis komputer, dikarenakan sarana dan prasarana belum siap. Disamping itu pula UN sekarang tidak menjadi syarat kelulusan mutlak.

Dediwahudi menjelaskan sejauh ini persiapan UN berjalan lancar, sehingga berharap pelaksanaan UN berjalan lancar.

Adapun Anggota DPR RI Komisi X yang ikut dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Maluku dalam rangka memantau persiapan Ujian Nasional 2014-2015 dipimpin oleh H.Dedi Wahidi dari F-PKB dan didampingi sepuluh anggota DPR, Zulfadhli dari FPG, Sri Melly Ana dari F-GERINDRA, Jefirstson R.Riwu Kore anggota F-PD, Muslim dari F-PD, Anang Hermansyah (F-PAN), Lathifah Shohib (F-PKB), Reni Marlinawati (F-PPP), Surahman Hidayat (F-PKS), Teuku Taufiqulhadi (NASDEM) dan Ferry Kase (F-HANURA). (Andri)

foto: andri/parle/hr

Komputer Terbatas, UN MAN Bangil, Pasuruan Bergiliran

Jumlah komputer yang tak sebanding dengan banyaknya peserta Ujian Nasional (UN) berbasis komputer (*Computer Based Test/CBT*) atau biasa disebut UN *online* di Madrasah Aliyah Negeri Bangil, memaksa pihak sekolah membagi siswa peserta UN bergiliran dalam beberapa gelombang. Demikian salah satu hasil pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI

saat meninjau pelaksanaan UN di MAN Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (13/4).

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR Prof. Hamka Haq menjelaskan bahwa dirinya dan rombongan datang untuk memantau dan mendengar secara langsung hambatan-hambatan apa saja dalam proses UN *online* di MAN Bangil. “Semua temuan serta

masukannya dari pihak sekolah selaku penyelenggara akan menjadi bahan evaluasi dengan jajaran pemerintahan terkait,” jelas Hamka dalam sambutannya.

Agar tidak mengganggu konsentrasi siswa yang tengah UN, Anggota Tim Kunker Komisi VIII DPR memilih hanya menggelar pertemuan dengan pihak sekolah di ruang guru MAN



Bangil yang lokasinya cukup berjauhan dengan ruang kelas tempat pelaksanaan UN *online*. Dalam kesempatan tersebut, Alfian Makmur selaku Kepala Sekolah MAN Bangil mengemukakan bahwa pelaksanaan UN berbasis komputer/CBT (UN *online*) di sekolahnya berjalan relatif lancar. Hal tersebut karena sekolah melakukan persiapan jauh-jauh hari menyangkut persiapan teknis dan berbagai faktor pendukung lainnya.

“Kami juga mendapat dukungan dari pihak Telkom dengan menambah kecepatan akses internet dari awalnya hanya 20Mbps menjadi 100 Mbps, hal ini sangat membantu mengatasi resiko akses internet yang lambat saat UN *online* berlangsung,” ungkap Alfian saat berdialog dengan Anggota Komisi VIII DPR RI. Walau demikian pihaknya sempat khawatir karena proses *download* aplikasi (soal ujian) sesuai aturan baru bisa dilakukan Minggu dini hari dan waktunya sangat mepet dengan pelaksanaan UN pagi harinya. “Jika terjadi kegagalan *download* aplikasi, maka otomatis pelaksanaan UN bisa mundur, syukurlah semua prosesnya di sini lancar,” ujarnya lega.



Tim kunker spesifik Komisi VIII DPR meninjau UN MAN di Bangil, Jatim

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nurwahid mengingatkan pihak sekolah perlu menyiapkan siswa dalam menghadapi UN berbasis komputer ini. Jangan sampai konsentrasi siswa yang sudah bagus justru terganggu lantaran adanya berbagai kendala teknis saat pelaksanaan UN *online*. “Saya menyadari penyelenggaraan UN *online* ini tidaklah mudah, oleh karenanya sekolah harus serius dalam menyiapkan segala sesuatunya,” pesan Hidayat.

Anggota Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI sebelumnya juga meninjau pelaksanaan UN di MAN Pajajaran Kabupaten Probolinggo. Ikut serta dalam peninjauan tersebut antara lain Hamka Haq, Agus Susanto, Samsu Niang, M Nur Purnamasidi, Muhammad Syafi'i, Khatibul Umam Wiranu, Kuswiyanto, Maman Imanul Haq, Hidayat Nurwahid, Hasan Aminuddin dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin. (Naefuroji/parle)
foto: naefurodji/parle

Keberadaan BPJS Kesehatan Bentuk Tanggung Jawab Negara



Anggota Komisi IX DPR Ali Mahir

Pelaksanaan BPJS Kesehatan selama ini didasarkan pada UU No.24/2011 tentang BPJS dan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU itu mengamanatkan negara harus hadir melayani kebutuhan kesehatan bagi warganya.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir (Dapil Jateng II) saat dihubungi Senin (13/4), menanggapi gugatan sejumlah perusahaan swasta yang mengajukan *judicial review* UU BPJS Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). *Judicial review* tersebut diajukan dengan argumen bahwa BPJS selama ini telah melakukan

praktik monopoli terhadap jasa layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Hendaknya harus dipahami bahwa layanan kesehatan oleh BPJS adalah tanggung jawab negara kepada rakyat miskin yang diberikan dalam bentuk penerima bantuan iuran (PBI). Layanan kesehatan bagi rakyat miskin selama ini justru tak terlayani oleh negara. Karena layanan kesehatan bagi rakyat miskin dibayar negara, maka fasilitas kesehatan milik pemerintah menjadi garda terdepan dalam mewujudkan layanan kesehatan,” papar politisi Partai Nasdem tersebut.

Seperti diketahui, besaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk rakyat miskin adalah Rp19.225 per bulan. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk mengcover semua layanan kesehatan di rumah sakit swasta. Di sinilah pentingnya kehadiran negara dalam membantu rakyat miskin yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Pelaksanaan jaminan sosial di dunia, lanjut Mahir, selalu diselenggarakan oleh negara, karena menyangkut hak dasar warga negara yang diatur konstitusi.

“Prinsip penyelenggaraan BPJS tidak mencari keuntungan. Jika rakyat miskin dibiarkan negara berkompetisi memperoleh layanan kesehatan oleh swasta, maka kejadian memilukan akan banyak terjadi. Kita saksikan, ada jenazah

disandera RS swasta, karena keluarganya tidak mampu membayar pengobatan hingga meninggal. Ada lagi, bayi yang lahir lalu disandera RS, karena orangtuanya tidak memiliki uang. Ini harus diakhiri dan jangan ada kejadian serupa,” imbuhnya.

Sementara itu, empat perusahaan yang telah mengajukan *judicial review* UU BPJS Kesehatan ke MK adalah PT. Papan Nirwana, PT. Cahaya Medika Health Care, PT. Ramamuza Bakti Usaha, dan PT. Abdiwaluyo Mitrasedjahtera. (mh), foto : husen/parle/hr.

Anggaran Sosialisasi BPJS di Kepri Perlu Ditambah



Hamid Noor Yasin dan Ermalena saat mengunjungi RSUD Kepri

Wilayahnya yang berupa pulau-pulau kecil dan tersebar luas hingga ke utara Nusantara, membuat sosialisasi BPJS Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum optimal. Apalagi, banyak peserta BPJS Kesehatan juga belum

melunasi iurannya.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi IX DPR RI Hamid Noor Yasin (Dapil Jateng III), saat dihubungi Senin (13/4), usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke Provinsi Kepri.

Untuk itu, Hamid mengusulkan anggaran sosialisasi ditambah untuk mengoptimalkan manfaat program jaminan kesehatan nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan ke tengah masyarakat pesisir di Kepri.

Hamid menambahkan, masih banyak penduduk di Kepri yang belum terdaftar di BPJS. Begitu juga banyak rumah sakit swasta di Kepri belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Menurut saya, masalah ini muncul karena sosialisasi yang belum maksimal. Boleh jadi ini karena wilayah Kepri yang luas dan berbentuk kepulauan. Sebagai solusi, Pemda bisa alokasikan tambahan dana untuk unit sosialisasi,” kilah Anggota F- PKS ini.

Namun secara umum, nilai Hamid, layanan kesehatan di RSUD Kepri sangat bagus. Yang perlu sedikit dibenahi adalah kelengkapan alat kesehatan dan penambahan tenaga kesehatan. “Harus disiapkan infrastruktur dan supstruktur rumah sakit. Begitu juga alat kesehatan dan SDM kesehatan yang betul-betul melayani rakyat,” imbu Hamid. (mh) foto: husen/parle/hr

Komisi IX DPR Soroti Pembangunan 10.000 Unit Rusunawa

Kementerian Ketenagakerjaan RI di tahun 2015 ini memprogramkan pembangunan 10.000 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) bagi kesejahteraan pekerja. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 7.600 unit dan 2.400 unit oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Program pembangunan Rusunawa dan Rusunami ini menjadi sorotan Anggota Komisi IX DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja



Pimpinan Komisi IX DPR RI

Hanif Dhahiri dipimpin Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi, Senin (13/4/2015) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi IX dari F-Nasdem Ali Mahir minta Kementerian Ketenagakerjaan mempertimbangkan jarak lokasi pembangunan Rusunawa dekat dengan kawasan industri dimana tempat para pekerja bekerja. Hal ini dimaksudkan, agar upah yang diterima cukup untuk menyewa rumah tersebut dan untuk memenuhi kehidupan keluarganya.

Siti Masrifah (F-PKB) memperta-

nyakan siapa yang akan mengelola dana yang nanti diterima dari Rusunawa tersebut. Ia juga mempertanyakan lokasi pembangunan Rusunawa dan Rusunami tersebut.

“Ada 10.000 unit Rusunawa di 14 provinsi, jika dibagi rata berarti ada 714 unit per provinsi, bagaimana dengan pembagian lokasinya, di satu lokasi atau di banyak lokasi?”, tanya politisi dari Daerah Pemilihan Banten ini.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Elva Hartati (F-PDIP) menyatakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami harus tepat sasaran, jangan sampai

jatuh pada orang yang bukan pekerja atau buruh. Karena Rusunawa dan Rusunami diperuntukkan untuk pekerja atau buruh.

Sedangkan, Anggota Komisi IX Okky Asokawati minta pembangunan Rusunawa tersebut agar dipastikan dibangun di kawasan industri. Pasalnya ide pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

“Saya berharap Kementerian Tenaga Kerja betul-betul mengawal lokasi pembangunan Rusunawa tersebut,” kata politisi dari Fraksi PPP ini. (sc) foto: *naefuroji/parle*

Hanya Satu SMA di Bali Yang Laksanakan UN Berbasis Komputer



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam didampingi Sekda dan Kadis Pendidikan Prov. Bali

Di Provinsi Bali pelaksanaan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer atau *Computer Based Test* (CBT) hanya dilaksanakan oleh satu sekolah yaitu SMA IT Global di Kabupaten Singaraja. Kendala yang menghambat UN berbasis komputer karena fasilitasnya masih minim. Apalagi syarat yang ditentukan adalah sekolah harus memiliki komputer 1/3 dari jumlah siswa yang mengikuti UN.

Salah satu temuan Tim Kunker Spesifik Komisi X yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ridwan Hisyam pekan lalu di Bali saat mengunjungi SMA 5 dan SMK 2 Denpasar, serta berdialog dengan Sekda Provinsi Bali Cok Ngurah Pamatur, Kepala Di-

nas Pendidikan Tia Kusumawardani serta Panitia UN Provinsi Bali serta pejabat lain.

Secara umum, kata Tia Kusumawardani kepada Tim Komisi X DPR bahwa persiapan pelaksanaan UN Tingkat SMA di Bali berjalan lancar. Sedangkan kendala UN berbasis komputer karena peraturan Kemendikbud, dimana seluruh satuan pendidikan yang melaksanakan UN harus memiliki 1/3 komputer dari jumlah siswa yang mengikuti UN.

“Jadi kendala kami adalah sarana dan prasarana. Kami mohon bantuan DPR pada UN tahun depan bisa ditambah fasilitas komputer tersebut sehingga UN CBT bisa dilaksanakan seluruh SMA-SMK di Bali,” kata Sekda Cok Ngurah Pamatur. Harapan yang sama diungkapkan Kepala SMA 5 Denpasar Nyoman Winata dan Kepala SMK 2 Wayan Sarjana.

Kepada DPR mereka juga berharap, dalam rangka pelaksanaan UN CBT tahun depan, maka paling tidak bisa diberikan bantuan fasilitas komputer tersebut enam bulan, sehingga siswa-siswa sudah mahir menggunakan komputer.

Ketua Tim Kunker Ridwan Hisyam mengatakan, aspirasi dari Bali berupa kekurangan komputer ini akan dibahas dengan pemerintah pusat. Masalahnya, pada tahun depan pengelolaan SMA sederajat akan diserahkan Pemerintah Provinsi. Karena itu, usulan tersebut akan dibahas dengan lembaga yang terkait dengan masalah keuangan dan pemerintahan. Mereka juga berharap pada saat masa transisi maka tidak ada mutasi aset maupun pegawai utamanya para guru.

(mp) foto: *mastur/parle/hr*

UN 2015 Diharapkan Jadi UN Kejujuran

Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam mengharapkan, ujian nasional (UN) tingkat SMA yang digelar Senin (13/4) hingga Rabu (15/4) akan menjadi ujian kejujuran. Pasalnya UN kali ini tidak seketat UN sebelumnya dengan mengerahkan pengawas dari kepolisian

bahkan suasananya seperti perang saja. Juga pengawas dari perguruan tinggi tidak lagi masuk ke sekolah, hanya membantu masalah administrasi soal dan penilaian.

“Pengawasan UN dipercayakan kepada guru dan diatur secara silang.

Dan yang lebih penting, tidak ada lagi target-targetan. Mematok target kelulusan sudah bukan jamannya lagi,” ujar Ridwan saat diminta komentarnya usia memimpin Tim Kunker Spesifik ke Provinsi Bali, belum lama ini.

Komisi X DPR mengirim tiga tim pe-

mantau UN tingkat SMA 2015 ke tiga Provinsi. Tim ke Bali diberi tugas memantau pra UN atau persiapan sebelum UN. Sedangkan dua tim ke Sumbar dan Maluku melakukan pemantauan pelaksanaan UN atau pada hari Senin sampai Rabu (13-15/4).

Menurut politisi Golkar dari Dapil Malang Raya ini, target kelulusan menjadi beban sekolah dan anak-anak. Kalau dulu, jika target kelulusan tercapai, maka kepala dinas dijanjikan kenaikan jabatan. Begitu pula Bupati atau Walikota akan dipromosikan jabatan yang lebih tinggi.

“Target-target seperti tidak ada gunanya lagi, yang akan terjadi kecurangan-kecurangan,” tegas Hisyam. Kesan yang sama disampaikan anggota



Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR Ridwan Hisyam

Tim Kunker Spesifik Komisi X Sofyan Tan bahwa SMA 5 dan SMK 2 Denpasar tidak lagi minta bantuan polisi untuk melakukan pengawasan UN. Selain itu tidak terjadi kecurangan seperti bocornya soal-soal UN serta jual beli soal. Meski demikian dia berharap sekolah-sekolah tetap memperhatikan kualitas termasuk persiapan memasuki perguruan tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tia Kusumawardani mengatakan, pengawasan UN kali ini tidak melibatkan perguruan tinggi, hanya masing-masing sekolah di Satuan pendidikan. “Peran Perguruan Tinggi hanya melakukan pemindaian hasil UN,” tambahnya. (mp)

foto: mastur/parle/hr

RUU Jasa Konstruksi Siapkan Perlindungan dan Kualitas Daya Saing



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat pertemuan dengan Pemprov. Jatim

Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini merupakan salah satu RUU Inisiatif DPR RI dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2015-2019. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M.Said mengatakan, revisi terhadap UU tentang Jasa Konstruksi perlu dilakukan karena perkembangan yang semakin pesat, dengan harapan bisa bersaing dengan negara lain, khususnya menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

“RUU ini memberikan perlindungan terhadap masyarakat jasa konstruksi baik pelaku usaha maupun tenaga kerja konstruksi di dalam negeri,” demikian disampaikan Muhidin, Rabu (8/4), di Gedung Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Ia menjelaskan beberapa substansi dalam RUU ini akan mengatur, antara lain terkait kelembagaan. Dalam RUU ini terdapat dua kelembagaan, yaitu Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi Nasional (BASJKN), dan Lembaga Pengembangan.

“Konsep kelembagaan ini guna memisahkan antara fungsi registrasi dan sertifikasi, dengan fungsi penelitian dan pengembangan (Litbang), pendidikan dan pelatihan (diklat),” ungkapnya.

BASJKN merupakan badan yang memiliki fungsi akreditasi dan sertifikasi yang dibiayai oleh APBN, diharapkan dalam kegiatan operasionalnya tidak menemui kendala anggaran. Sebaliknya hasil pungutan dari proses akreditasi dan serifi-

kasi menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara, Lembaga Pengembangan yang merupakan wujud peran masyarakat jasa konstruksi berfungsi menjalankan atau mendorong penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian, menjalankan mediasi dan penilai ahli, serta menunjuk dan menetapkan penilai ahli.

Dalam konsep RUU, menurut Muhidin, terdapat perubahan bidang usaha dan siklus pekerjaan konstruksi. “Pembidangan usaha jasa konstruksi didasarkan pada *Central Product Classification/CPC* (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang kompatibel dengan playing field dan standar internasional,” paparnya.

Selanjutnya, terkait kegagalan konstruksi yang dalam RUU dibedakan menjadi kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan. Resiko kegagalan konstruksi diakibatkan oleh tidak terpenuhinya standar keselamatan konstruksi yang diatur lebih tegas dalam RUU ini. Termasuk pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya resiko kegagalan konstruksi dan peran penilai ahli dalam penetapan pihak yang bertanggung jawab dan dalam tahapan pekerjaan konstruksi terkait kesalahan terjadi. “Kegagalan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana,” tegas Muhidin.

Mengenai kesetaraan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dan kepastian hukum, maka RUU ini diatur standar minimal kontrak kerja konstruksi. RUU ini juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat jasa konstruksi baik pelaku usaha maupun tenaga kerja konstruksi di dalam negeri.

“Terdapat batasan dan persyaratan yang lebih selektif terhadap badan usaha asing maupun tenaga ahli asing yang ingin mengerjakan pekerjaan konstruksi di Indonesia,” katanya. (as) foto: agung/parle/hr



Ujian Nasional *Online* Masih Menyisakan Masalah

Ujian Nasional (UN) setingkat SMA dengan sistem *online* atau UN berbasis komputer (*Computer Based Test/CBT*) masih terdapat beberapa kendala karena merupakan sistem baru. Meskipun demikian, ia menaruh harapan besar jika sistem ini berhasil dapat diterapkan bukan hanya pada sistem ujian tetapi juga pada proses pengajaran di seluruh sekolah di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Kuswiyanto, anggota Komisi VIII DPR RI saat memantau pelaksanaan UN berbasis komputer (*CBT/UN online*) di salah satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (13/4).

“Saya membayangkan kalau sistem *online* ini berhasil maka merupakan satu lompatan besar bagi kemajuan dunia pendidikan. Ke depan, tidak hanya untuk ujian tapi bisa diterapkan dalam proses pembelajaran,” ujar politisi PAN ini.

Politisi F-PAN yang sangat *concern* dengan dunia pendidikan ini menambahkan bahwa dari hasil kunjungannya ke Jawa Timur khusus terkait UN Sistem *Online* masih menyisakan beberapa permasalahan.

“Dari informasi yang saya peroleh, di Surabaya ada siswa yang tidak bisa tersambung ke sistem untuk memasukkan jawaban. Harus menunggu sampai jam 4 sore setelah semua

teman-temannya pulang baru bisa. Ini bisa menyebabkan stres luar biasa bagi siswa tersebut”, tambah Kuswiyanto. Menurutnya, kejadian seperti itu seharusnya bisa diprediksi sebelumnya dan disiapkan solusi.

“Harus ada plan B ketika siswa tidak bisa akses *online*, misal disiapkan dengan cara manual sehingga tidak usah menunggu berjam-jam yang dapat memicu stress siswa,” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tersebut.

Sistem *online*, menurut Kuswiyanto, perlu juga didukung oleh peningkatan integritas dari semua pihak yang terlibat, yakni pembuat soal, dinas pendidikan, kepala soal, pengetik soal, dan bahkan orang tua siswa harus juga memiliki integritas yang baik.

“Dengan sistem apapun jika tidak ada integritas tidak akan benar,” tandasnya.

Saat ini masih ada stigma di kalangan siswa dan orang tua bahwa ujian sekolah tujuannya untuk lulus bukan untuk menguasai standar kompetensi yang ditentukan kurikulum. Sementara, tujuan dari ujian nasional tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ujian tidak lagi sebagai penentu kelulusan.

Hal ini, menurut Kuswiyanto, jika tidak diberikan pemahaman dan sosia-

lisasi tentang arti penting kompetensi, maka para siswa dan orang tua tadi akan menganggap ujian nasional bukan lagi sesuatu yang penting, karena beranggapan pasti lulus.

Dari hasil pemantauan UN di Jawa Timur yang dilakukan Komisi VIII DPR, khususnya pada sekolah lanjutan atas keagamaan (Madrasah Aliyah) perlu ada beberapa perbaikan.

“Dari sisi teknologi harus disiapkan secara matang kesiapan komputer dan jaringan yang memadai. Sekarang masih baru dicobakan ke 585 sekolah. Bayangkan nanti kalau semua sekolah serentak dengan sistem *online*, mampu tidak jaringan servernya menampung *loading* data yang begitu besar,” jelas Kuswiyanto.

Tak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Dari sejak soal dibuat, diketik ke dalam sistem *online*, dikoneksikan melalui internet, guru, dan semua pihak harus siap. Hal paling penting adalah perlu dipastikan sistem itu berjalan.

“Dengan sistem *online* seharusnya orang tua bisa langsung melihat hasilnya dalam waktu singkat. Kalau harus diolah manual lagi percuma,” pungkas Kuswiyanto. (*naefuroji*) foto: *naefurodji/parle/hr*



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi tiga Wakil Ketua DPR RI dan Ketua BKSAP menerima kunjungan kehormatan Dubes Belanda HE. Mr. Rob Swartbol, Kamis (16/04)
Foto: Iwan Armanias/Parle/lw



Wakil Ketua DPR RI /Korkesra Fahri Hamzah didampingi Karo Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko audiensi dengan Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB (Forum Wacana IPB), Senin (13/04)
Foto: Iwan Armanias/Parle/lw



Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan PARFI, BPI, PPFI, dan IMPAS dipimpin Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya, terkait masuknya LSF menjadi mitra Komisi I DPR RI, Selasa (14/04) Foto: Iwan Armanias/Parle/lw